

**KONSEP EMPOWERMENT SEBAGAI INSTRUMEN PEMBANGUNAN
EKONOMI ISLAM DALAM MENGHADAPI PANDEMI COVID-19 DI
INDONESIA (TELAAH KRITIS PEMIKIRAN IBNU KHALDUN)**

Endah Susanti

Universitas Muhammadiyah Berau

ABSTRACT

This study aims to see the concepts and theories of development economics based on the Islamic economic point of view of the figure of Ibn Khaldun. The focus in this research is on the concept of Islamic economic development based on Ibn Khaldun in looking at the concept of community empowerment and its benefits as an alternative to overcoming the problems of economic development after the Covid-19 pandemic that hit Indonesia. This research is a library research with qualitative data and analysis.

The results of the study show the economic concept of Islamic development by Ibnu Khaldun, namely First, the Role of Humans "arrijal". Second, the Role of Development or "al-Imarah" and Justice or "al-adl". Third, the role of institutions and government. Fourth, the role of wealth or "al-mal". In his analysis, Ibn Khaldun also emphasized the importance of division of labor and specifications for developing the economy together by promoting the concept of cooperation. From Ibn Khaldun's thoughts on the development of Islamic economics, it is known that the concept of Islamic economic development does not only measure the level of welfare in the world, but more importantly how to achieve prosperity in the hereafter. The concept that is built is more directed at the concept of empowerment or empowerment of natural resources in an efficient and fair manner with the role of upholding ethical values and social justice.

The Covid-19 pandemic is a social disaster whose impact is felt by the entire community. The crisis that occurred in 2020 is the biggest public health and humanitarian crisis, which not only causes health emergencies but also provides significant economic losses. Referring to the concept of Islamic economic development by Ibnu Khaldun, efforts to overcome the problem of poverty due to this pandemic are not sufficient only relying on government resources, but also requires the participation and cooperation of all parties. The synergy between the government and the private sector, universities, and other non-governmental institutions needs to be strengthened to accelerate economic recovery in areas affected by the corona virus.

Keywords: Islamic Economic Development, Ibnu Khaldun, Empowerment, Covid-19

PENDAHULUAN

Kondisi pandemi Covid-19 yang mendera seluruh dunia termasuk negara Indonesia tak hanya menciptakan krisis kesehatan masyarakat, pandemi Covid-19 secara nyata juga mengganggu aktivitas ekonomi nasional. Keputusan pemerintah Indonesia yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sejak bulan April tahun 2020 berdampak luas dalam proses produksi, distribusi, konsumsi dan kegiatan operasional lainnya yang pada akhirnya mengganggu kinerja perekonomian.

Ekonomi Indonesia di tahun 2020 tumbuh negatif. Pada kuartal IV, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih resesi. Pertumbuhan ekonomi kuartal IV tercatat sebesar -2,19 persen secara *year on year*. Angka pengangguran dan kemiskinan pun meningkat.

Krisis ekonomi adalah krisis yang paling dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan krisis ekonomi mampu menyentuh langsung keperluan dasar masyarakat baik pada aspek biologis maupun sosiologis. Pembangunan ekonomi yang disertai dengan perunahan struktur sosial akan banyak

menimbulkan masalah moral. Oleh karena itu alternatif yang dapat dilakukan ekonomi dalam merespon aspek moral dengan cara mengaitkan pembangunan ekonomi dengan agama.

Islam memberikan tawaran sistem alternatif yang secara utuh memuat nilai-nilai kehidupan dunia maupun akhirat. Selain itu, keunikan pendekatan Islam terletak pada sistem etika dan nilai yang mewarnai tingkah laku ekonomi. Hal demikian dapat mengangkat nilai-nilai instrumental, dan norma-norma operasionalnya dalam usaha pembangunan ekonomi masyarakat. Bukan hanya sekedar kerangka pemikiran dari sebuah sistem pemikiran ekonomi Islam, namun juga dibutuhkan rekonstruksi pemikiran guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang *sustainable* dan berkelanjutan.

Kontribusi dan peran aktif ekonomi islam terhadap pembangunan ekonomi masih dirasa sulit untuk diimplementasikan di negara Indonesia. Sampai saat ini belum ada satu pun negara yang secara utuh menerapkan sistem ekonomi Islam. Mayoritas di beberapa negara hanya lebih

Volume 5, No.1, April 2021. Hal. 2

memandang pada satu sektor sebagai instrumen pengukuran pembangunan ekonominya, yaitu melalui lembaga keuangan Islam. Padahal masih banyak instrumen ekonomi Islam, seperti, industri syariah, wisata syariah, hotel Syariah, halal food dan lain-lain. Dengan demikian, apabila berbicara tentang ekonomi Islam, maka seharusnya pola pikir tersebut mengarah pada perilaku ekonomi secara luas yang meliputi produksi, distribusi dan konsumsi.

Sejarah telah mencatat bahwa Ibnu Khaldun, adalah seorang sejarawan muslim dari Tunisia dan sering disebut sebagai bapak pendiri ilmu historiografi, sosiologi dan ekonomi. Sebagai ahli politik Islam, ia pun dikenal sebagai bapak Ekonomi Islam, karena pemikiran-pemikirannya tentang teori ekonomi yang logis dan realistis jauh telah dikemukakannya sebelum tokoh Adam Smith (1723-1790) dan David Ricardo (1772-1823) mengemukakan teori-teori ekonominya. (wikipedia)

Ibnu Khaldun telah banyak memberikan konsep pemikiran bagi masyarakat Muslim. Ibnu Khaldun

membincangkan berbagai topik seperti sejarah, geografi, matematik, agama, sistem kerajaan, sistem ekonomi, sistem pendidikan dan lain-lain (Huda, 2013).

Menurut hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Mohammad dengan menggunakan pendekatan Ibnu Khaldun, ia menyimpulkan bahwa Ibnu Khaldun juga telah memberikan konsep pemikirannya tentang pembangunan ekonomi yang ideal (Mohammad, 2010). Artinya ekonomi pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan dasar seluruh umat manusia (*basic needs*). Sebaliknya, fenomena konsumsi berlebihan, korupsi moral dan keserakahan ekonomi adalah indikator awal kejatuhan sebuah peradaban suatu negara. Dengan tawaran ekonomi pembangunan Ibnu Khaldun demikian tidak menutup kemungkinan jika terealisasi secara maksimal, sistem ekonomi pembangunan Islam di Indonesia akan semakin menunjukkan taring kekuatannya. Bahkan dari itu, perekonomian akan lebih bermanusiawi dan tidak hanya memandang kehidupan di dunia saja, namun hakikat akhirat yang lebih kekal juga menjadi alasan utama.

Ibn Khaldun juga berpandangan bahwa dalam bidang ekonomi antara satu komunitas dengan komunitas lain harus dapat saling bekerjasama dan saling melengkapi agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan dalam pandangan teori ekonomi pembangunan konvensional, masalah utama ekonomi pembangunan hanya dapat dilihat dari sudut pandangnya terhadap kemiskinan, pengangguran, kesenjangan ekonomi dan sosial antar individu. Hal demikian di Indonesia masih belum bisa terentaskan secara efektif. Salah satu alasan utamanya karena tidak adanya kerja sama yang saling sersinergi antara pemangku kebijakan dan masyarakat secara umum. Disamping itu pula, variabel lain belum sepenuhnya diperhatikannya sebagai barometer ekonomi pembangunan, seperti; sosial hukum, politik, budaya dan variabel barometer pembangunan lainnya. Padahal ekonomi pembangunan Islam telah lahir jauh sebelum itu sudah menjadi salah satu alternatif konstruktif pembangunan.

Pembangunan ekonomi menurut ekonomi Islam, bukan sekedar terkait dengan peningkatan terhadap barang

dan jasa. Islam tidak melihat pertumbuhan kekayaan sebagai sesuatu yang terpisah dengan cara distribusinya (pemerataan) dan tuntutan realisasi keadilan. Perkembangan ekonomi yang ideal akan mampu terwujud dengan optimal dan memiliki dampak terhadap pemerataan ekonomi jika tidak hanya dibutuhkan suatu pertumbuhan tetapi juga dibarengi dengan pemerataan. Dengan pemerataan perkembangan ekonomi yang adil akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Istrumen pembangunan ekonomi Islam yakni zakat, infak dan sedekah menjadi kewajiban dan anjuran bagi seluruh umat Islam sebagai solusi kemiskinan. Hal ini menunjukkan sesungguhnya ekonomi Islam telah memahami problem utama ekonomi pembangunan di kala itu. Ekonomi pembangunan Islam hadir untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh negara-negara miskin (negara berkembang) yang merdeka pasca perang dunia kedua. Namun faktanya, di Indonesia masih banyak kemiskinan dan kesenjangan ekonomi terutama pasca dilanda pandemi Covid-19.

Berdasarkan paparan konsep pembangunan ekonomi Islam di atas, tulisan ini selanjutnya bertujuan untuk melihat konsep dan teori ekonomi pembangunan berdasarkan sudut pandang ekonomi Islam dari tokoh Ibnu Khaldun. Selain itu, munculnya tawaran sistem ekonomi Islam yang berbasis pemberdayaan (*empowerment*) yang diusung oleh lembaga keuangan, baik dalam skala mikro maupun makro menjadi penting untuk diulas lebih panjang. Fokus dalam ulasan ini pada konsep pembangunan ekonomi Islam berdasarkan Ibnu Khaldun dalam memandang konsep empowerment masyarakat dan manfaatnya sebagai alternatif penanggulangan permasalahan pembangunan ekonomi pasca pandemi covid-19 yang melanda Indonesia.

KAJIAN TEORI

Teori Ekonomi Pembangunan Islam

Ekonomi pembangunan dunia ditandai dengan kemajuan sains dan teknologi share sektor perdagangan dan transportasi yang penuh dengan kompetisi dan lokomotifnya yang dibangun adalah lingkaran kapitalis (Aedy,2011). Sistem kapitalis menjadi

populer dengan keyakinan yang kuat dan mendewakan liberalisasi sebagai tulang punggung dalam pembangunan ekonomi. Namun, dalam perjalanannya sistem ini dinilai gagal menciptakan pemerataan dan keadilan pembangunan dan hanya menyisahkan ketimpangan yang semakin mendalam antar individu, kelompok, antar sektor perekonomian, antar wilayah bahkan antar negara khususnya negara maju dan NSB (negara sedang berkembang).

Kemiskinan dan pengangguran berkepanjangan, kemelaratan dan juga eksploitasi sumber daya alam praktis menjadi dampak yang sangat merugikan Negara Sedang Berkembang atau kelompok yang lemah. Karena itu keadilan dan kemakmuran untuk penduduk bumi tidak akan pernah terwujud selama tidak ada perubahan yang mendasar terutama kebebasan pasar sebagai sumber kedaulatan yang mengatur perekonomian dunia. Negara yang Sedang Berkembang mengalami kesulitan untuk membebaskan diri dari ketidakberdayaan, yang berimplikasi terhadap sumberdaya manusia yang amat rendah, kesenjangan sosial, kemiskinan dan pengangguran yang

tidak kunjung padam dan luput dari perhatian dunia (Chapra,2008). Dari 57 negara di dunia yang diukur dengan menggunakan data Tingkat Kenaikan Pendapatan per Kapita dunia (Maddison dalam Sukirno, 2010) dan indeks Tingkat Konsumsi per Kapita menurut indikator non moneter tahun 1950-1999 menunjukkan perbedaan dan perubahan ketimpangan yang amat signifikan (Beckerman dalam Sukirno,2010).

Ilmu pembangunan ekonomi islam diperlukan dalam rangka memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Negara-negara yang baru saja merdeka dan bahkan belum mampu untuk berkembang. Pada umumnya negara-negara ini adalah negara yang sedang berkembang dan menghadapi masalah yang sama yaitu kemiskinan, kebodohan, pengangguran, keterbelakangan, dan ketertinggalan dalam semua aspek kehidupan. Di lain sisi negara-negara Islam pada umumnya tidak mampu menginternalisasi mesin pertumbuhan. Paradok yang terjadi di negara Muslim adalah bahwa mereka kaya akan sumber daya alam, namun ekonominya lemah dan miskin (Khursid, 1980), oleh karena itu,

pembangunan ekonomi Islam sangat dibutuhkan untuk mengubah cara berfikir tentang konsep pembangunan ekonomi masyarakat secara umum, utamanya di negara Indonesia.

Dalam perkembangannya, para ahli ekonomi akhirnya memberikan pengertian dan juga batasan tentang ekonomi pembangunan berdasarkan latar belakang tersebut. Ilmu Ekonomi pembangunan adalah suatu studi yang ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup penduduk di Negara sedang berkembang, dengan cara memecahkan berbagai masalah-masalah utamanya, yakni kemiskinan, pengangguran dan pemerataan (Aedy, 2011).

Khurshid Ahmad menegaskan bahwa konsep pembangunan yang Islami sebenarnya dapat ditarik dari konsep tazkiyah, yang berarti penyucian terhadap sikap dan hubungan tersebut di muka bumi. Hasil dari tazkiyah adalah falâh, yaitu sukses di dunia maupun di akhirat (Khurshid, 1976).

Lahirnya pembangunan ekonomi Islam bermaksud mengatasi masalah-masalah tersebut dengan cepat, tepat, dan tuntas berlandaskan kepada

kedua sifat dasar tujuan pembangunan ekonomi Islam. Maka analisa ilmu ekonomi pembangunan Islam dapatlah didefinisikan sebagai suatu cabang ilmu ekonomi yang bertujuan untuk menganalisa masalah-masalah yang dihadapi oleh Negara berkembang dan mendapatkan cara-cara untuk mengatasi masalah-masalah itu supaya Negara-negara tersebut dapat membangun ekonominya dengan lebih cepat dan tepat sesuai dengan ajaran Islam yang lebih menjunjung etika perekonomian.

Ilmu Ekonomi pembangunan Islam bersifat menyeluruh dan tidak diukur dengan menggunakan alat kekayaan ataupun jumlah peningkatan pendapatan, melainkan kekayaan dan pendapatan yang didapatkan tersebut digunakan untuk mengantarkan pemilik kekayaan kepada tingkat kesejahteraan dunia dan akhirat (Martono, 2008). Oleh karena itu, untuk menciptakan pembangunan ekonomi Islam dimulai dengan dua barometer khusus yaitu kesejahteraan masyarakat yang terjadi di dunia dan akhirat nantinya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) dengan data dan analisis kualitatif (Moloeng, 1999). Metode kualitatif merupakan penelitian yang memiliki sasaran penelitian yang terbatas tetapi dengan keterbatasannya dapat digali sebanyak mungkin data mengenai sasaran penelitian (Bungin, 2001). Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data kualitatif yang diperoleh dari sumber-sumber otentik yang terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Adapun sumber utama dalam penelitian ini yaitu dari beberapa buku, jurnal dan artikel tentang ekonomi pembangunan serta informasi yang diperoleh dari temu ilmiah baik dalam skala nasional ataupun Internasional.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konsep Pembangunan Ekonomi Islam Ibnu Khaldun

Pemikiran fonomenal Ibnu Khaldun tentang ilmu ekonomi pembangunan Islam dapat kita temukan dalam karyanya yakni *Muqaddimah*. Buku ini dinamakan *Muqaddimah* karena merupakan landasan teoritis tentang sejarah (termasuk di dalamnya dasar ilmu-ilmu sosial) yang dia tulis menjadi buku yang jauh lebih besar dan Volume 5, No.1, April 2021. Hal. 7

berjilid-jilid, berjudul Kitâb Al-Ibar. Kata Al-Ibar bisa berasosiasi dengan kata-kata pinjaman dari bahasa Arab, yaitu ibarat, atau mengambil tamsil (pelajaran yang tersembunyi). Jadi, Kitab Al-Ibar berarti kitab yang mengambil pelajaran dari sejarah bangsa Arab dan bangsa Barbar (Rachman, 2011). Pembahasan Ibnu Khaldun mengenai pembangunan ekonomi termasuk tema yang penting dalam karya ini. Istilah pembangunan dalam karyanya mengacu pada istilah “umran al-alam” atau memakmurkan dunia. Istilah “umran al-alam” dibentuk dari tiga komponen yaitu; sejarah (tarikh), kerjasama masyarakat (al-ijtima` al-insani) dan alam semesta (al-kawn) (Tohir, 2014).

Muhamad Sa`id Ramadan al-Buti (1998) membagi konsep pembangunan ekonomi menurut Ibnu Khaldun menjadi tiga komponen juga, yaitu manusia (*insan*), kehidupan (*al-hayat*) dan alam (*al-kawn*). Ketiga komponen ini berinteraksi antara satu dengan lainnya dalam masyarakat yang digerakkan oleh semangat persaudaraan (solidaritas atau *ashabiyah*) sehingga melahirkan negara (*dawlah*) dan

kemakmuran (*umran*). Di atas kaidah inilah *umran al-`alam* dapat didefinisikan suatu ilmu baharu lagi “dinamik” serta mengandung makna yang sangat luas, bukan saja dari segi sosial atau pembangunan yang bersifat fizikal dan lokal, tetapi merangkumi aspek rohani dan jasmani yang bersifat “universal” bagi tujuan mencapai kebahagiaan dan kemakmuran manusia” di dunia dan di akhirat (Yahya, 2011).

Berikut delapan nasehat Ibnu Khaldun yaitu; 1) Pemerintah yang kuat tidak akan terwujud kecuali melalui pelaksanaan syariah, 2) Syariah tidak dapat diwujudkan kecuali melalui pemerintahan (*al-mulk*), 3) Kerajaan tidak akan meningkatkan kekuatannya kecuali melalui masyarakat (*ar-rijal*), 4) Masyarakat tidak akan bertahan kecuali dengan kekayaan (*al-mal*), 5) Kekayaan tidak dapat diperoleh kecuali dengan pembangunan (*al-imarah*), 6) Pembangunan tidak dapat dicapai kecuali dengan keadilan (*al-adl*), 7) Keadilan adalah kriteria (*al-mizan*) yang mana digunakan oleh Tuhan untuk menilai manusia, dan 8) Pemerintahan

dibebankan tanggung jawab untuk merealisasikan keadilan.

Berdasarkan delapan nasehat Ibnu Khaldun tentang pembangunan ekonomi yang dikutip dari kitab *muqaddimah*. Ibnu Khaldun dapat memberikan elaborasi dari delapan prinsip tersebut agar mudah dipahami. Sehingga pemikiran dia terkenal dengan multidisiplin dan memiliki karakter yang dinamis serta mengandung nilai-nilai religiusitas. Sebab analisis dari Ibnu Khaldun mampu menghubungkan semua variabel penting sosio-ekonomi dan juga politik. Berikut tawaran Ibnu Khaldun terhadap konsep pembangunan ekonomi Islam:

Pertama, Peran Manusia atau *arrijal*, manusia memiliki ciri-ciri sendiri yaitu; a) manusia memiliki pengetahuan dan keahlian yang merupakan hasil dari berfikir, b) manusia butuh akan pengaruh yang sanggup mengendalikan, dan kepada kekuasaan yang kokoh, sebab tanpa itu (yang dimaksud adalah organisasi masyarakat atau *ijtima insani*) eksistensinya nihil, c) manusia bisa melakukan berbagai usaha untuk menciptakan penghidupan, d) manusia

menginginkan peradaban yang maju (Ibnu Khaldun, 2000).

Kedua, Peran Pembangunan atau *al-imarah* dan Keadilan atau *al-adl*, Jika manusia menjadi pusat analisis, maka pembangunan dan keadilan menjadi hubungan paling penting dalam rangkaian sebab-akibat bangkit dan runtuhnya suatu negara. Pembangunan ekonomi menjadi sangat penting karena tanpa adanya perbaikan nyata dalam kesejahteraan rakyat, mereka tidak termotivasi untuk melakukan yang terbaik dan lebih bermamfaat. Selain itu, dengan tidak adanya pembangunan, masuknya cendekiawan, seniman, tenaga kerja dan modal yang harus diadakan dari masyarakat lain untuk mendorong pembangunan lebih lanjut menjadi tantangan suatu negara.

Ketiga, peran lembaga dan pemerintah, sebaik apapun sebuah peraturan tidak akan berarti jika tidak dilaksanakan secara adil dan tidak memihak. Syariah pada hakikatnya hanya bisa memberikan sebuah aturan dalam masyarakat, ia tidak dapat berjalan dengan sendirinya. Oleh karena itu diperlukan sebuah otoritas yang bisa

Volume 5, No.1, April 2021. Hal. 9

menjalankan semua aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, dan pedoman. Menurut Ibnu Khaldun, *al-mulk* memiliki arti kerajaan yang mana seharusnya seorang pengusaha dapat membela dan berpihak pada rakyatnya untuk mewujudkan kesejahteraan negaranya.

Keempat, peran kekayaan atau *al-mal*, Kekayaan dalam kehidupan sangatlah penting, karena kekayaan dapat menyediakan bahan utama yang diperlukan untuk memastikan keadilan dan pembangunan berjalan dengan baik, mampu memacu efektifitas pelaksanaan aturan yang dibuat oleh pemerintah, serta terciptanya kesejahteraan masyarakat. Kekayaan tidak tergantung pada satu pos tertentu. Dalam analisisnya Ibnu Khaldun juga menekankan pentingnya pembagian kerja dan spesifikasi untuk membangun ekonomi secara bersama dengan mengedepankan konsep kerjasama.

Konsep Empowerment Sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi Islam

Kata Pemberdayaan adalah terjemahan dari empowerment, sedang memberdayakan adalah terjemahan dari

empower. Menurut Merriam Webster kata empower mengandung dua pengertian, yaitu: (1) *to give power* atau *authority to* atau memberi kekuasaan, dapat bermakna juga mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain; (2) *to give ability to* atau *enable* atau usaha untuk memberi kemampuan atau keperdayaan. (Webster,2004)

Konsep pemberdayaan mulai menjadi diskursus pembangunan, ketika orang mulai mempertanyakan makna pembangunan. Di negara Eropa, wacana mengenai pemberdayaan muncul ketika industrialisasi menciptakan masyarakat yang menguasai faktor produksi dan masyarakat yang pekerja yang dikuasai. Di negara-negara sedang berkembang, wacana pemberdayaan muncul ketika pembangunan menimbulkan disinteraksi sosial, kesenjangan ekonomi, degradasi sumberdaya alam, dan juga alienasi masyarakat dari faktor-faktor produksi oleh penguasa.

Konsep kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah penguatan dari pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat

untuk mendapatkan gaji/upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan ketrampilan, yang harus dilakukan secara multi aspek, baik dari aspek masyarakatnya sendiri, maupun aspek kebijakannya.

Pembangunan ekonomi Islam tidak cukup hanya memandang untuk mengukur tingkat kesejahteraan saat di dunia, jauh lebih penting dari itu yaitu bagaimana kesejahteraan di akhirat nantinya. Konsep yang dibangun Ibnu Khaldun tersebut mengarah pada sebuah konsep kegiatan pemberdayaan atau *empowerment* sumber daya secara efisien dan merata dengan menjunjung nilai-nilai etika dan keadilan sosial.

Konsep kegiatan Pemberdayaan masyarakat tergolong pada sebuah strategi pembangunan ekonomi yang sekarang ini sudah banyak diterima di kalangan masyarakat kecil utamanya di negara Indonesia, bahkan telah berkembang dari berbagai konsep dan lembaga yang mewadahnya. Salah satu contoh konsep *empowerment* ini yaitu banyak dipraktikkan lembaga keuangan mikro Islam.

Kegiatan usaha pemberdayaan masyarakat tidak hanya menjadikan individu atau kelompok berdaya dalam mengatasi permasalahan ekonomi saja, seperti biaya hidup, makanan, tempat tinggal dan lainnya. Akan tetapi, masyarakat tersebut juga memiliki daya atau kemampuan dari segala aspek pengetahuan, spiritual, dan juga aspek sosialnya. Sebab, permasalahan yang dihadapi masyarakat tidak hanya bertitik tumpuh pada masalah ekonomi saja, namun juga ada masalah pengetahuan, masalah spiritual, dan masalah kehidupan sosial mereka baik antar individu maupun kelompok.

Agen pemberdayaan (*agent of empowerment*) mesti mengingat bahwa konsep utama dari pemberdayaan masyarakat tidak hanya memandang kesejahteraan material saja, namun juga harus memperhatikan kesejahteraan spiritual masyarakat yang akan diberdayakan. Seperti yang dikatakan oleh Moh. Ali Aziz bahwa “Konsep utama dari pemberdayaan adalah memandang inisiatif kreatif dari rakyat sebagai sumber daya dari pembangunan yang utama dan memandang kesejahteraan material dan spiritual

mereka sebagai tujuan yang ingin dicapai oleh proses pembangunan (Aziz, Suhartini, & Halim, 2005).

Konsep yang diusung oleh Khaldun sangat relevan sebagai pijakan untuk menemukan alternatif baru sebagai instrumen pembangunan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi menjadi sangat penting karena tanpa adanya perbaikan nyata dalam kesejahteraan rakyat, mereka tidak termotivasi untuk melakukan yang terbaik dan lebih bermanfaat. Selain itu, masuknya cendekiawan, seniman, tenaga kerja dan modal yang harus diadakan dari masyarakat mampu mendorong pembangunan lebih lanjut. Hal ini tentu saja dapat berjalan dengan baik jika didukung oleh negara. Negara hadir diwakili oleh lembaga-lembaga yang kompeten dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya melalui pemanfaatan kekayaan alam baik itu Sumberdaya manusia maupun sumber daya alam. Kerjasama yang baik dari semua pihak akan mendorong terwujudnya tujuan dari pembangunan ekonomi.

Pemberdayaan ekonomi umat dalam menghadapi pandemi Covid-19

Di Indonesia, kasus covid-19 untuk pertama kalinya terdeteksi di Indonesia yaitu pada tanggal 2 Maret 2020. Selanjutnya, hari demi hari peningkatan jumlah kasus penderita covid-19 berkembang secara signifikan di Indonesia sehingga Presiden Joko Widodo secara resmi menetapkan pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional yang tertuang pada Keputusan Presiden (Keppres) No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam *Corona Virus Disease* (Covid-19).

Di Indonesia, dampak dari pandemi covid-19 sangat terlihat jelas, salah satunya pada sektor ekonomi. Banyak masyarakat yang terkena imbas ekonomi dari pandemi Covid-19. Diantaranya usaha-usaha yang dimiliki oleh masyarakat menurun drastis tingkat penjualannya. Seperti yang kita ketahui bahwa dunia usaha merupakan salah satu tonggak penggerak pertumbuhan ekonomi.

Aktivitas ekonomi baik di pusat perbelanjaan, hotel, restoran, dan sektor-sektor lainnya juga mengalami penurunan dikarenakan daya beberapa faktor. Faktor pertama, penurunan perdagangan internasional dan investasi

Volume 5, No.1, April 2021. Hal. 12

pada seluruh negara terlihat pula pada penurunan tingkat produksi dan jasa. Investasi dan perdagangan internasional adalah faktor utama mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Hasilnya, tingkat konsumsi masyarakat juga ikut menurun. Inilah yang menyebabkan kegiatan ekonomi pasar melemah. Kedua, daya beli masyarakat yang menurun dikarenakan aktivitas ekonomi sedang tidak stabil sehingga banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan mereka. Ketiga, adanya kegiatan seperti pembatasan sosial (*social distancing*), karantina wilayah ataupun *lock down*. Dengan adanya *lock down* tersebut, maka mobilitas masyarakat tidak berjalan secara normal atau dibatasi. Masyarakat juga dituntut untuk berdiam diri di rumah demi memutus rantai penyebaran Covid-19. Maka secara otomatis, tingkat interaksi sesama manusia akan berkurang.

Pemerintah sebagai pelayan masyarakat seharusnya bertanggung jawab penuh atas setiap hal yang terjadi terhadap masyarakatnya. Khususnya pada masa pandemi Covid-19 ini, pemerintah harus menunjukkan sikap kepeduliannya terhadap masyarakat

melalui langkah strategis. Masyarakat membutuhkan solusi konkret dari pemerintah agar ketimpangan ditengah pandemi ini segera teratasi.

Ekonomi yang berbasis gotong royong (kerjasama semua pihak) harus dihadirkan untuk membantu dan memberdayakan ekonomi umat di masa Pandemi Covid-19 ini. Memupuk kesadaran dengan kepedulian antar sesama menjadi tanggung jawab kita sebagai umat Islam. Masyarakat harus sepakat berkomitmen untuk membantu masyarakat lain dan lebih peka melihat kondisi sekitar.

Sinergitas antara pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan. Jika antara masyarakat dan juga elemen pemerintah dapat saling berintegrasi dengan baik, maka peluang untuk memberdayakan ekonomi umat akan semakin terbuka luas. Pemerintah juga harus menjalin komunikasi yang lebih dekat dengan masyarakat, sehingga mereka akan mengetahui bagaimana kondisi masyarakat yang ada dalam lingkungannya.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari konsep pemikiran Ibnu khaldun mengenai pembangunan ekonomi Islam diketahui bahwa pembangunan ekonomi Islam tidak hanya mengukur tingkat kesejahteraan di dunia semata, jauh lebih penting dari itu yaitu bagaimana kesejahteraan di akhirat nantinya. Konsep yang dibangun lebih mengarah pada pemberdayaan atau empowerment sumber daya secara efisien dan merata dengan menjunjung nilai-nilai etika dan keadilan sosial.

Konsep dari empowerment atau pemberdayaan memberikan tawaran baru terhadap instrumen pembangunan ekonomi perspektif Islam yang mana hal ini diusung oleh Ibnu Khaldun. Pembangunan dalam karyanya Ibnu Khaldun mengacu pada istilah “umran al-alam” atau memakmurkan dunia. Istilah “umran al-alam” dibentuk dari tiga komponen yaitu; sejarah (tarikh), kerjasama masyarakat (*alijtima` al-insani*) dan alam semesta (*alkawn*).

Saran

1. Perlu adanya kesamaan paham mengenai konsep pemberdayaan, sebab pada akhir-akhir ini berbagai program/proyek dari pembangunan

yang diberi label pemberdayaan, walaupun sebenarnya justru mengingkari makna pemberdayaan.

2. Perlu ada koordinasi antar lembaga dan bahkan dalam lembaga dalam gerakan pemberdayaan masyarakat.
3. Program atau proye Pengembangan sumberdaya manusia dan juga Sumber daya alam dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat, harus mendapat penanganan yang serius. Sebab sumberdaya manusia dan sumber daya alam adalah unsur paling fundamental dalam usaha penguatan ekonomi rakyat.
4. Usaha mengatasi masalah kemiskinan akibat pandemi ini tidak cukup hanya mengandalkan sumber daya yang dimiliki pemerintah, namun juga memerlukan peran serta dan kerja sama semua pihak. Sinergi antara pemerintah dengan swasta, perguruan tinggi, maupun lembaga non-pemerintah lainnya, perlu diperkuat untuk mempercepat pemulihan ekonomi di daerah-daerah yang terdampak virus corona.

DAFTAR PUSTAKA

Aedy, H. (2011). Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam: Sebuah Studi Komparasi. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Aziz, Moh. Ali, Suhartini, R., & Halim, A. (2005). *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat: Paradigma Aksi Metodologi*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren atas kerjasama dengan Dakwah Press, Fakultas Dakwah, IAIN Sunan Ampel Surabaya.
- Bungin, B. (2001). *Metodologi Penelitian Sosial: Format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press
- Chapra, M. Umar. (2008). *Ibnu Khaldun's Theory of Development: Does It Help Explain the Low Performance Present-Day Muslim World? The Journal of Socio-Economics*, 37(02).
- Huda, C. (2013). *Pemikiran Ekonomi Bapak Ekonomi Islam: Ibnu Khaldun*. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 04(01).
- Ibnu Khaldun. (2000). *Muqaddimah*, terj. Ahmadie Thoha. Jakarta: Pustaka Firdaus
- Khurshid, A. (1976). *Economic Development in an Islamic Framework, Studies Islamic Economics*. King Abdul Aziz University.
- Khursid, A. (1997). *Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Islam, dalam Etika Ekonomi Politik*. Jakarta: Risalah Gusti
- Khursid, A. (1980). *Studies in Islamic Economics*. International Journal of Middle East Studies, 17(2), 413.
- Martono, T. (2008). *Ekonomi Pembangunan*. Surakarta: UNS Press.
- Mohammad, M. T. S. H. (2010). "Principles of Sustainable Development in Ibn Khaldun's Economic Thought. *Malaysian Journal of Real Estate*", 05(01)
- Moloeng, L. J. (1999). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Rachman, B. M. (2011). *Ensiklopedi Nurcholish Madjid: Pemikiran Islam di Kanvas Peradaban*. Jakarta: Democracy Project Yayasan Abad Demokrasi
- Sukirno, Sadono. 2010. *Makroekonomi. Teori Pengantar*. Edisi Ketiga. PT. Raja Grasindo Perseda. Jakarta.
- Tohir, M. (2014). *Rekonstruksi Pemikiran Pembangunan Ekonomi Islam menurut Pemikiran Al-Ghazali, Ibn Khaldun dan M. Umer Chapra (Skripsi)*. UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Webster, Merriam. 2004. *Merriam Webster's Collegiate Dictionary. United States of America: Merriam Webster Incorporated*
- Yahya, M. H. (2011). *Umran Al 'Alam Dari Perspektif Ibn Khaldun: Suatu Anjakan Paradigma*. *International Journal of West Asian Studies*, 03(01).



PISSN: 2622-5336
EISSN: 2620-5416

ECO-BUILD JOURNAL
Economy Bring Ultimate Information All About Development Journal
STIE MUHAMMADIYAH TANJUNG REDEB